

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan memegang peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Perusahaan berusaha menyajikan laporan keuangan yang berkualitas yaitu relevan dan andal agar tidak menyesatkan stakeholders. Para stakeholder berkepentingan terhadap informasi yang terkandung dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan bisnis dan investasi. Keputusan investasi dilakukan oleh para investor dan kreditur untuk menanamkan modalnya atau memberikan kapasitas pinjaman kepada perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan untuk kemakmuran pemilik dan menjaga keberlangsungan perusahaan di masa depan. Kaitannya untuk mencapai tujuan perusahaan, diperlukan sejumlah modal yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Modal yang ditanamkan di perusahaan diharapkan dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan perusahaan. Salah satu modal yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan adalah aset tetap (Nurjanah, 2013).

Aset tetap merupakan salah satu dari beberapa akun terpenting dalam laporan keuangan perusahaan yang memiliki nilai cukup besar. Nilai sekarang suatu aset tetap yang diperoleh beberapa tahun lalu tidak sama dengan harga perolehan aset tersebut yang tercatat pada laporan posisi keuangan. Penggunaan aset tetap secara efisien akan menentukan kinerja suatu perusahaan (Latifa, 2016). Pada saat entitas

menambah modalnya dalam bentuk uang, aset tetap sangat diperhatikan dalam menentukan kelayakan dan jumlah kredit yang akan diberikan, karena aset tetap digunakan sebagai jaminan kredit. Aset tetap juga menjadi salah satu faktor untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dengan adanya pengadaan dan pemakaian aset tetap, adapun pengadaan aset tetap perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan adalah aset yang memiliki masa pemakaian yang lama atau lebih dari satu periode dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Umumnya, aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehannya, lalu disusutkan nilainya selama masa manfaat aset tetap sehingga nilainya semakin lama semakin kecil. Namun penggunaan harga perolehan dalam penilaian aset menjadikan beberapa nilai aset tetap menjadi tidak relevan, karena tidak menunjukkan nilai terkini dari aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Agar relevansinya dari nilai aset tetap terjaga, perlu dipilih suatu kebijakan akuntansi atas aset tetap yang mencerminkan nilai sesungguhnya dari aset tetap yaitu kebijakan revaluasi aset tetap.

Baridwan (2008) mengemukakan bahwa untuk aset tetap apabila harga-harga sudah berubah dalam jumlah yang besar, maka rekening aset tetap yang memakai harga perolehan masa lalu sudah tidak mencerminkan keadaan riil dari aktiva tersebut. Tanah yang dijual tahun ini mungkin menghasilkan pendapatan cukup besar dibanding kas yang dikeluarkan untuk membeli tanah tersebut 20 tahun lalu. Nilai aset tetap perusahaan akan mengalami peningkatan seiring dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu inflasi dan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Melihat kondisi perekonomian Indonesia yang selama lima tahun terakhir saja inflasinya sangat berfluktuasi dimana inflasi tahun 2014 mencapai 8,3% sehingga nilai uang tidak lagi stabil. Dampak negatif dari inflasi yaitu naiknya harga barang dan jasa. Selama periode kenaikan harga, peralatan yang dibeli 10 tahun lalu kenyataannya untuk mengganti aktiva itu jauh lebih mahal. Saat inflasi, daya beli uang semakin melemah sedangkan harga barang relatif meningkat, sehingga diperlukan informasi tambahan yang menjelaskan perubahan harga yang membantu pemakai laporan keuangan untuk menaksir arus kas masa mendatang, kemampuan operasi, dan daya beli umum modal perusahaan. Penggunaan biaya historis mengakibatkan nilai aktiva tercatat dalam neraca mempunyai nilai yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan perkembangan daya beli uang. Alokasi untuk biaya depresiasi dan amortisasi akan dibebankan terlalu kecil sehingga mengakibatkan laba dihitung terlalu besar. Uraian tersebut menyimpulkan bahwa fluktuasi inflasi berdampak pada ketidakrelevanan nilai aset jika diukur dengan menggunakan harga perolehan. Harga perolehan yang menjadi dasar *historical cost* dianggap tidak cocok lagi karena tidak mencerminkan nilai pasar, padahal kondisi pasar semakin dinamis dan berkembang sangat cepat. Respon terhadap situasi tersebut, manajemen perusahaan dapat memilih kebijakan akuntansi yang bisa mencerminkan relevansi nilai aset, yang diperkenankan oleh PSAK No.16 yaitu model revaluasi. Setelah pengakuan awal, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar yang pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Revaluasi adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan yang diakibatkan kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai wajar (Waluyo & Ilyas, 2002). Revaluasi aset tetap juga akan menghasilkan beban penyusutan yang berbeda dibandingkan dengan jika tidak melakukan revaluasi. Penerapan revaluasi aset tetap akan menambah nilai dari aset tersebut. Adanya penambahan nilai aset akibat revaluasi tentu saja akan menambah nilai penyusutannya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka laba fiskal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut juga akan berubah bila melakukan kegiatan revaluasi aset tetap. Berubahnya laba fiskal perusahaan juga akan berdampak pada perubahan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan karena beban pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba fiskal. Jika laba fiskal perusahaan menjadi lebih kecil karena adanya penambahan nilai penyusutan, maka nilai pajak yang dibayarkan juga akan menjadi lebih kecil (Waluyo, 2010). Dengan kata lain revaluasi aset tetap merupakan salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan dalam perencanaan pajaknya (tax planning). Sesuai dengan pernyataan Suryani (2006) tujuan dari perencanaan pajak yaitu untuk mengefisiensikan jumlah pajak terhutang melalui penghindaran pajak (tax avoidance) tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan. (Suryani, 2006). Jadi, perencanaan pajak melalui penilaian kembali aktiva tetap dapat mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara laba komersial dan laba kena pajak.

Sejak awal tahun 1980-an Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) mulai meningkatkan pemakaian fair value (nilai wajar) dalam pelaporan akuntansi. Para pendukung fair value percaya bahwa pasar modal dan pengguna lain dari laporan keuangan membutuhkan pengukuran nilai yang lebih akurat. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menetapkan PSAK 16 tentang Aset Tetap yang mengadopsi IFRS (International Financial Reporting Standards) pada tahun 2011 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2012. Konvergensi IFRS menyebabkan terjadinya perubahan pada PSAK 16, diantaranya adalah perbedaan pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal. Sebelum dikeluarkannya PSAK 16 tahun 2011, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan. Namun setelah konvergensi IFRS, perusahaan dapat memilih menggunakan model biaya atau model revaluasi dalam menilai aset tetapnya (Latifa, 2016). PSAK 16 Revisi tahun 2011 menyatakan bahwa apabila suatu perusahaan memilih menerapkan model revaluasi aset tetap maka perubahan kebijakan pengukuran setelah pengukuran awal aset tetap tersebut harus dilakukan secara konsisten. Sekali perusahaan memilih menggunakan metode revaluasi, maka perusahaan tidak bisa kembali menggunakan model biaya. Informasi nilai wajar dianggap lebih relevan dibandingkan dengan informasi nilai perolehan, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan revaluasi aset setiap tahun selama nilai aset tidak berubah signifikan.

Revaluasi dapat dilakukan kembali apabila nilai wajar aset yang telah direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah tercatat. Revaluasi aset tetap dengan mengikuti PSAK 16 dilakukan hanya untuk memperbaiki laporan posisi

keuangan. Perlu dipahami bahwa tidak ada penambahan cash inflow pada perusahaan dari kebijakan revaluasi karena perhitungannya hanya dibuku saja dengan pencatatan debit aset tetap dan kredit surplus revaluasi. Perusahaan pun tidak dapat membagikan dividen dari proses revaluasi. Meskipun DSAK telah menetapkan PSAK 16 Revisi 2011 tentang Aset Tetap yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, namun masih sedikit perusahaan di Indonesia yang memilih untuk melakukan revaluasi aset tetap. Perusahaan lebih memilih menggunakan metode biaya daripada revaluasi aset tetap dalam menilai aset yang dimiliki. Seng dan Su (2010) berpendapat bahwa revaluasi aset tetap membutuhkan biaya yang mahal, seperti biaya penggunaan tenaga penilai (valuer fee) yang cukup tinggi dan peningkatan biaya audit. Selain itu, perusahaan juga harus membayar biaya pajak atas revaluasi aset tetap. Biaya yang mahal merupakan salah satu faktor penyebab perusahaan lebih memilih untuk menggunakan metode biaya dalam menilai aset tetap.

Menurut Andison (2015) kebijakan untuk melakukan revaluasi aset tetap dapat mencerminkan keadaan aset yang sebenarnya, karena dalam praktiknya perusahaan akan mencatat aset menggunakan nilai pasar aset saat ini. Sehingga nilai aset yang disajikan di laporan keuangan menjadi relevan. Kerelevanan nilai aset akan menunjang perbaikan kinerja perusahaan. Adanya kenaikan nilai aset akibat revaluasi aset tetap, perusahaan dapat melakukan aktivitas-aktivitas lain yang dapat menunjang peningkatan kinerja, salah satunya dalam kegiatan peminjaman. Penyajian nilai aset perusahaan yang relevan diharapkan dapat menarik perhatian kreditor, sehingga perusahaan dapat melakukan pinjaman

dengan mudah terhadap pihak lain (Nurjanah, 2013). Hal ini dapat terjadi karena aset tetap dapat digunakan sebagai jaminan kredit dalam melakukan pinjaman (Hastuti, 2016).

Revaluasi aset tetap dapat memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Menurut Dewi (2014), laporan posisi keuangan akan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang wajar sehingga pemakai laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan tepat. Selisih lebih penilaian kembali juga akan meningkatkan struktur modal sendiri, yang artinya perbandingan antara pinjaman (debt) dengan modal sendiri menjadi semakin baik. Kekurangan dari revaluasi aset tetap adalah meningkatnya beban penyusutan aset tetap yang dibebankan dalam laba rugi atau dibebankan ke harga pokok produksi pada periode berjalan. Selain itu, revaluasi aset tetap membutuhkan biaya yang mahal, seperti biaya jasa penilai, biaya audit serta biaya pajak atas revaluasi aset tetap (Seng dan Su, 2010).

Dengan adanya berbagai kelebihan dan kekurangan revaluasi aset tetap, manajemen perusahaan harus mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diterima perusahaan di masa sekarang dan masa depan jika perusahaan memutuskan untuk melakukan revaluasi aset tetap. Adanya kenaikan nilai aset tetap setelah dilakukan revaluasi akan berdampak pada beban penyusutan aset di tahun-tahun berikutnya menjadi lebih besar. Beban penyusutan yang semakin besar akan mengurangi laba perusahaan, sehingga dapat meminimalkan pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Meskipun pada saat melakukan revaluasi laba perusahaan akan berkurang, namun kebijakan ini akan memberikan

manfaat lain seperti laporan posisi keuangan akan menunjukkan posisi keuangan yang wajar sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat (Waluyo, 2016).

Penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa faktor yang terbukti berpengaruh dalam pemilihan metode revaluasi aset tetap. Lin dan Peasnell (1992), pada penelitiannya di Inggris, menunjukkan bahwa revaluasi aset tetap memiliki asosiasi positif terhadap ukuran suatu perusahaan. Hal ini sesuai juga dengan hasil penelitian Tay (2009) di Selandia Baru. Ukuran perusahaan merupakan proksi dari faktor politik, dimana perusahaan yang lebih besar cenderung melakukan revaluasi aset untuk memproyeksikan konservatisme dengan mengurangi laba perusahaan, dan mengurangi biaya politik yang potensial (political size hypothesis). Tay (2009) pada penelitiannya di Selandia Baru membuktikan bahwa intensitas aset tetap terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap pilihan metode revaluasi untuk mengurangi pelaporan profitabilitas perusahaan, baik melalui depresiasi yang lebih besar, maupun dengan peningkatan basis aset yang digunakan untuk mengukur return on equity.

Penelitian yang dilakukan Missonier-Piera (2007) pada perusahaan di Swis membuktikan bahwa leverage berpengaruh signifikan secara positif terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Perusahaan dengan leverage yang tinggi akan memilih model revaluasi untuk menurunkan tingkat hutang mereka, sehingga meningkatkan kelayakan dihadapan kreditor. Likuiditas memiliki korelasi negatif terhadap pilihan metode revaluasi, karena revaluasi membantu memberikan informasi yang lebih aktual tentang jumlah kas yang dapat diterima dari penjualan



aset, dan dengan demikian membantu meningkatkan kapasitas pinjaman perusahaan serta mengurangi biaya pinjaman (Tay, 2009).

Beberapa perusahaan di Indonesia telah melakukan revaluasi aset tetap. Sebagaimana dikutip dari Liputan6.com, Rizal Ramli yang menjabat sebagai Menteri Perekonomian (19 November 2015) menyatakan bahwa salah satu perusahaan yang mendapatkan keuntungan cukup besar dari revaluasi aset tetap yaitu PT PLN. Revaluasi aset tetap pernah menyelamatkan PLN dari kebangkrutan pada tahun 2000. Saat itu perusahaan memiliki modal negatif sebesar Rp 9 triliun, sedangkan aset yang dimiliki hanya Rp 50 triliun. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut PT PLN melakukan revaluasi aset tetap dan hasilnya nilai aset meningkat menjadi Rp 250 triliun. Selisih revaluasi dimasukkan ke modal, modal yang tadinya negatif menjadi Rp 104 triliun. Sayangnya, pajak yang harus dibayarkan oleh PLN dari revaluasi aset mencapai 30 persen. Itu artinya PLN harus membayar setoran pajak sekitar Rp 50 triliun. Namun perusahaan tidak sanggup membayar, sehingga pemerintah memberikan keringanan bagi PLN untuk mencicil pajak tersebut selama 7 tahun. PT PLN melakukan revaluasi aset pada tahun 2015. Setelah melakukan revaluasi aset tetap pada tahun 2015, terdapat beberapa aset PT PLN yang nilainya bertambah besar. Adanya peningkatan nilai aset setelah revaluasi menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Selain itu, dengan peningkatan nilai aset perusahaan akan membuat perusahaan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar.

Revaluasi aset tetap juga mendapat dukungan pemerintah. Dikutip dari Liputan6.com pemerintah memasukan revaluasi aset ke dalam salah satu dari 3 intisari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V pada tanggal 22 Oktober 2015. 6 Pemerintah berharap paket kebijakan ekonomi tersebut dapat merangsang pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Kebijakan ini dikeluarkan karena masih banyak perusahaan yang belum melakukan revaluasi aktiva dengan adanya perubahan nilai aktiva, baik akibat inflasi maupun deflasi rupiah. Kebijakan ini juga diharapkan bisa membantu meningkatkan performa finansial perusahaan melalui perbaikan nilai aset. Menteri Keuangan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016. Pasal 1 menyebutkan bahwa wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan akan mendapat perlakuan khusus berupa PPH yang bersifat final sebesar 3% atau 4% atau 6% yang dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali.

Pemerintah optimis revaluasi aset akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada tahun ini. Dengan kebijakan tersebut, aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diprediksi menembus Rp 2.000 triliun dan membuka peluang menerbitkan surat utang hingga US\$ 100 miliar atau sekitar Rp 350 triliun. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyatakan, total aset perusahaan pelat merah Indonesia pasca sebagian BUMN mengikuti revaluasi atau penilaian kembali aset tercatat Rp 800 triliun.

Menurut Rizal, Jika semua BUMN lakukan revaluasi aset, paling tidak aset BUMN naik Rp 2.000 triliun seperti yg dikutip dari Liputan6.com, Jakarta Senin (22/2/2016). Bila aset perusahaan pelat merah mencapai angka Rp 2.000 triliun, kata Rizal, pemerintah akan meminta kepada BUMN yang telah melakukan revaluasi aset menerbitkan surat utang dalam denominasi rupiah maupun valuta asing (valas). Rizal meyakini dengan penerbitan surat utang senilai US\$ 100 miliar, maka akan membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti harapan Presiden Jokowi membangun kereta api di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Kata Rizal, revaluasi aset akan mengangkat perekonomian Indonesia ke level 6 persen di 2016. Sementara lembaga internasional memprediksikan ekonomi Indonesia akan bertumbuh di kisaran 5,2 persen-5,3 persen tanpa memperhitungkan kontribusi dari revaluasi aset.

Berdasarkan PSAK No. 16 Revisi 2011 ada 2 syarat melakukan revaluasi. Pertama, revaluasi dilakukan untuk seluruh aset tetap dalam kelas yang sama. Suatu kelas aset tetap adalah pengelompokan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Misalnya entitas merevaluasi sebidang tanah, dia harus merevaluasi seluruh tanah yang dimiliki, tidak bisa memilih sesuai keinginan (cherry picking). Syarat kedua, ketika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap, maka perubahan tersebut berlaku prospektif. Artinya kebijakan diterapkan pada kejadian atau transaksi yang terjadi setelah tanggal perubahan, tidak memerlukan penyesuaian terhadap periode sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) mengatur lebih ketat karena mensyaratkan perusahaan terbuka yang memilih menggunakan model revaluasi untuk melakukan penilaian kembali nilai wajar dengan menggunakan penilaian dari KJPP.

PSAK Konvergensi IFRS mengharuskan manajer untuk memilih salah satu metode pengukuran untuk menilai aset tetap, yaitu menggunakan model biaya atau revaluasi. Mengingat masih sedikitnya perusahaan di Indonesia yang melakukan revaluasi aset tetap, maka penulis tertarik untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan revaluasi aset tetap pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun terdapat perbedaan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Seng dan Su (2010) meneliti tentang faktor-faktor yang mendorong manajer untuk melakukan revaluasi aset tetap di perusahaan New Zealand. Adapun faktor-faktor yang diteliti yaitu *contracting factor* yang diukur dengan leverage dan penurunan arus kas dari operasi. Faktor politik yang diukur dengan ukuran perusahaan, dan asimetri informasi yang diukur dengan revaluasi tahun sebelumnya, intensitas aset tetap, pertumbuhan perusahaan, dan pengumuman pemberian saham bonus. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa hanya variabel ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan pengumuman bonus yang berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2016) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi revaluasi aset tetap menemukan hasil bahwa hanya variabel leverage berpengaruh positif terhadap revaluasi aset tetap. Andison (2015) membuktikan bahwa leverage, dan

*market to book ratio* berpengaruh positif terhadap kebijakan revaluasi aset tetap, sementara likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan revaluasi aset tetap. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Manihuruk dan Farahmita (2015) menemukan hasil bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pemilihan metode revaluasi aset tetap. Penelitian yang dilakukan oleh Seng dan Su (2010) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap di perusahaan New Zealand. Namun penelitian yang dilakukan di Indonesia, oleh Latifa (2016) dan Nurjanah (2013) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan revaluasi aset tetap.

Penelitian Tay (2009), membuktikan bahwa *fixed asset intensity* dan *firm size* berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dalam melakukan revaluasi aktiva tetap. Sedangkan *leverage*, *liquidity* dan *market to book ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan revaluasi aktiva tetap. Penelitian oleh Egy dan Erly (2012) dalam Nurjanah (2013), menemukan variabel yaitu rasio *leverage*, penurunan kas dari aktivitas operasi dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan revaluasi aktiva tetap, tidak terdapat pengaruh yang signifikan, untuk rasio *leverage* dan ukuran perusahaan pada tingkat signifikansi masing-masing 10%.

Penelitian Nurjanah (2013), membuktikan bahwa struktur aset dan *ownership control* berpengaruh positif terhadap kebijakan revaluasi aktiva tetap. Sedangkan untuk variabel *investment opportunity set* berpengaruh negatif terhadap kebijakan revaluasi aktiva tetap. Penelitian lain oleh Yulistia (2014), membuktikan dari hasil penelitiannya bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap perusahaan dalam melakukan kebijakan revaluasi aktiva tetap, sedangkan untuk *leverage* dan *fixed asset intensity* tidak berpengaruh terhadap kebijakan revaluasi aktiva tetap.

Mengingat banyaknya keuntungan dan manfaat yang diperoleh perusahaan apabila melakukan revaluasi aset tetap, diharapkan banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan revaluasi aset tetap. Namun berdasarkan data yang diperoleh, jumlah perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap di Indonesia masih sedikit.

Berdasarkan asumsi dan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Revaluasi Aset Tetap (Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2017)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Fluktuasi inflasi yang terjadi di Indonesia akan berdampak pada ketidakrelevanan nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan jika disajikan menggunakan metode biaya. Dengan adanya kenaikan harga-harga barang di pasaran, maka nilai aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai wajar saat ini.
2. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menetapkan PSAK 16 tentang Aset Tetap yang mengadopsi IFRS (International Financial Reporting Standards) pada tahun 2011 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2012.

Konvergensi IFRS menyebabkan terjadinya perubahan pada PSAK 16, diantaranya adalah perbedaan pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal. Sebelum dikeluarkannya PSAK 16 tahun 2011, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan. Setelah konvergensi IFRS, perusahaan dapat memilih menggunakan model biaya atau model revaluasi dalam menilai aset tetapnya. DSAK telah menerbitkan PSAK sejak 2012, namun perusahaan di Indonesia yang menerapkan kebijakan revaluasi aset tetap jumlahnya masih sedikit.

3. Adanya asimetri informasi antara pihak manajemen dan pemegang saham yang menyebabkan manajemen dapat bertindak untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Hal ini dapat memberikan peluang kepada manajemen untuk bertindak oportunistik, sehingga diperlukan upaya untuk mencegah tindakan oportunistik manajemen melalui penyajian nilai aset tetap menggunakan nilai wajar.

4. Model standar akuntansi keuangan Indonesia yang berbasis IFRS dianggap lebih bias meningkatkan kualitas standar laporan keuangan dan daya banding laporan keuangan pada perusahaan yang sudah mengimplementasikan IFRS (Bank Indonesia 2011)

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap. Penelitian ini juga dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2017.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Apakah Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yg terdaftar di BEI tahun 2015-2017?
- b. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yg terdaftar di BEI tahun 2015-2017?
- c. Apakah leverage berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yg terdaftar di BEI tahun 2015-2017?
- d. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yg terdaftar di BEI tahun 2015-2017?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yg terdaftar di BEI tahun 2015-2017.



- b. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh likuiditas terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yg terdaftar di BEI tahun 2015-2017.
- c. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh leverage terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yg terdaftar di BEI tahun 2015-2017.
- d. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yg terdaftar di BEI tahun 2015-2017.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah sekaligus pendalaman materi yang didapatkan dari kegiatan perkuliahan. Selain itu, hasil penelitian dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap terhadap keputusan melakukan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

##### **2. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya tentang pengaruh, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap yang berpengaruh terhadap keputusan melakukan revaluasi aset tetap.

### 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai karakteristik dan kondisi yang mendasari pertimbangan pengambilan keputusan pihak manajemen untuk memilih metode akuntansi, yaitu keputusan revaluasi aset tetap.

### 4. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan melakukan revaluasi aset tetap. Selain itu, perusahaan dapat mengetahui keuntungan dan kerugian revaluasi aset tetap. Sehingga perusahaan dapat memilih kebijakan penilaian aset yang terbaik untuk perusahaan.